



RENJA

2026

**Dinas Lingkungan Hidup Dan
Kehutanan Kabupaten Kutai
kartanegara**





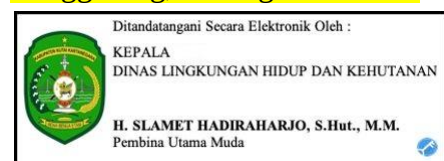
KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur kehadiran Allah Subhana Wata'ala, Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2026 dapat diselesaikan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, yang memuat latar belakang penyusunan, landasan hukum, maksud dan tujuan serta yang terpenting adalah memuat mengenai evaluasi, analisis kinerja, isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi.

Kami menyadari dalam penyusunan rencana kerja ini masih banyak terdapat kekurangan dan belum sepenuhnya memenuhi harapan, namun telah menjadi komitmen kami untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan yang telah disusun dan ditetapkan. Akhir kata semoga Rencana Kerja (Renja) DLHK kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya, dan dapat mendorong kita untuk segera mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan

Tenggarong, 13 Agustus 2025





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU.....	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD.....	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	23
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.....	24
2.4 Review Terhadap RANWAL RKPD.....	27
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	41
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	48
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.....	48
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja-PD.....	43
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	43
4.1 Program dan Kegiatan Tahun 2026.....	43
BAB V PENUTUP.....	66
5.1 Catatan Penting.....	66
5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan.....	66
5.3 Rencana Tindak Lanjut.....	69





BAB I PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

1.1. Latar Belakang

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen hasil evaluasi yang memuat kebijakan, program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, dan pagu indikatif yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran

untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan rancangan awal Renja ini merupakan hasil pembahasan atas usulan program dan kegiatan yang telah disinergikan dengan hasil Musrenbang Kabupaten Kutai Kartanegara dengan tetap mengacu pada program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah, dalam hal ini Renstra **2021-2026**.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terdapat 5 (lima) tujuan pelaksanaan system perencanaan pembangunan nasional, yaitu : a) untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, serta antar pusat dan daerah; c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; d) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan e) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Untuk itu diperlukan dokumen perencanaan yang meliputi dokumen perencanaan jangka panjang dituangkan dalam Rencana





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Jangka menengah yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, Perencanaan pembangunan tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan ruang lingkup tugas pokok dan fungsi utamanya di bidang tata lingkungan, bidang pengelolaan sampah dan limbah B3, bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup tentunya memerlukan kemampuan untuk berinteraksi dan menjalin hubungan yang harmonis, baik secara struktural (*vertical* dan *horizontal*) maupun hubungan kepada masyarakat. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui sebuah perencanaan yang profesional dengan memanfaatkan peluang serta menghindari ancaman yang ada, menggunakan kekuatan yang dimiliki dan mengeliminasi kelemahan yang muncul. Secara operasional perencanaan tersebut dijabarkan dalam penyusunan rencana kerja tahunan yang disusun setiap tahun.

Di dalam Rencana Kerja (Renja) diuraikan mengenai evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan perencanaan pada tahun ke depan, visi dan misi bagi penyelenggaraan pembangunan bidang lingkungan hidup dan kehutanan, sehingga memenuhi fungsi pelayanan, pembangunan dan pengaturan. Selain itu juga menguraikan berbagai tujuan, sasaran kegiatan yang akan dilaksanakan dengan penekanan diberbagai aspek pembangunan.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang akan dituangkan dalam Rancangan APBD (RAPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026.





1.2. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
- d. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- g. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- h. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.60/MENLHK/SETJEN/2015 Tentang Peran Masyarakat dan pelaku usaha dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan;
- i. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.33/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim;
- j. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup dan urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- m. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- n. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- o. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- p. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Noor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2026;
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem informasi Pemerintahan Daerah;
- s. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- t. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
- u. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023;
- v. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No.21 tahun 2012 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- w. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026;
- x. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- y. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- z. Surat Sekretariat Daerah Nomor P-57/BAPPEDA/000.7.2/02/2024 tentang Penyampaian Jadwal Penyusunan RKPD Tahun 2026.





1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2026 yakni tersedianya suatu dokumen perencanaan program, kegiatan dan anggaran untuk Tahun 2026 yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah dalam bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang dapat dijadikan acuan dan pegangan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara dan seluruh stakeholder terkait pada tahun 2026 dalam melaksanakan pembangunan urusan lingkungan hidup dan kehutanan secara efektif dan efisien.

Tujuan dari penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

- a. Menjadi acuan bagi seluruh unit kerja di Lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2026 di bidang lingkungan hidup dan kehutanan ;
- b. Menentukan prioritas kegiatan pembangunan bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. Mewujudkan sinergitas dan keselarasan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan bidang lingkungan hidup;
- d. Mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya manusia, sarana dan prasarana maupun dana dalam pembangunan bidang lingkungan hidup.





1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan dengan pokok bahasan Serta susunan garis besar penulisan renja ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III Tujuan dan sasaran perangkat daerah

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2026

BAB V PENUTUP





**BAB II EVALUASI
PELAKSANAAN
RENJA-PD TAHUN
LALU**

*2.1 Evaluasi Pelaksanaan
Renja- PD Tahun Lalu
(2025) dan Capaian Renstra
Tahun 2026*

*2.2 Analisis Kinerja
Pelayanan Dinas
Lingkungan Hidup dan*

*2.3 Isu-isu Penting dalam
Penyeenggaraan Tugas dan
Fungsi OPD*

*2.4 Review Terhadap
Rancangan Awal
RKPD/Renstra Dinas
Lingkungan Hidup dan
Kehutanan*

**BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN
RENJA PD TAHUN LALU**

**2.1. Evaluasi pelaksanaan renja tahun
lalu dan capaian renstra perangkat
daerah**

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. Oleh

karena itu Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 dan tahun berjalan (2025) juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan capaian Renstra.

Pada Tahun 2026, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perubahan (renstra) Perubahan 2021-2026.

Berikut ini adalah realisasi keuangan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024.





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Sisa Pagu Anggaran	Presentase Realisasi Keuangan (%)
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.733.593.442	25.667.716.652	22.246.815.197	3.420.901.455	86,67
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	377.380.000	418.380.000	366.835.279	51.544.721	87,68
2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	157.380.000	198.380.000	196.785.823	1.594.177	99,20
2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	220.000.000	220.000.000	170.049.456	49.950.544	77,30
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.212.065.972	17.381.516.534	15.070.171.345	2.311.345.189	86,70
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.007.065.972	17.176.516.534	14.888.011.345	2.288.505.189	86,68
2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	205.000.000	205.000.000	182.160.000	22.840.000	88,86
2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	48.880.000	70.860.000	66.860.000	4.000.000	94,36
2.11.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	48.880.000	70.860.000	66.860.000	4.000.000	94,36
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	785.010.000	886.010.000	665.885.906	220.124.094	75,16
2.11.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	334.460.000	435.460.000	329.093.000	106.367.000	75,57
2.11.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	50.550.000	50.550.000	33.169.500	17.380.500	65,62
2.11.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	400.000.000	400.000.000	303.623.406	96.376.594	75,91
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.416.000.000	1.420.370.000	1.248.414.904	171.955.096	87,89
2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	40.000.000	39.896.500	103.500	99,74
2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	150.000.000	150.000.000	135.655.700	14.344.300	90,44
2.11.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30.000.000	30.000.000	27.015.000	2.985.000	90,05
2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.000.000	28.000.000	26.378.600	1.621.400	94,21
2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.000.000	8.000.000	7.995.500	4.500	99,94
2.11.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	100.000.000	100.000.000	84.325.100	15.674.900	84,33
2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500.000.000	549.000.000	479.399.044	69.600.956	87,32
2.11.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	250.000.000	250.000.000	189.549.460	60.450.540	75,82
2.11.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	350.000.000	265.370.000	258.200.000	7.170.000	97,30
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	914.822.950	2.169.043.440	2.015.297.000	153.746.440	92,91
2.11.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	839.250.000	827.740.000	11.510.000	98,63
2.11.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	600.000.000	600.000.000	522.511.000	77.489.000	87,09
2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	274.822.950	617.993.440	561.680.000	56.313.440	90,89
2.11.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40.000.000	111.800.000	103.366.000	8.434.000	92,46
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.233.434.520	2.711.536.678	2.279.565.282	431.971.396	84,07
2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	290.052.000	429.980.108	326.985.162	102.994.946	76,05
2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.943.382.520	2.281.556.570	1.952.580.120	328.976.450	85,58





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.746.000.000	610.000.000	533.785.481	76.214.519	87,51
2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	275.000.000	273.627.000	209.901.500	63.725.500	76,71
2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.136.000.000	1.373.000		1.373.000	0,00
2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.000.000	35.000.000	29.920.000	5.080.000	85,49
2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	300.000.000	300.000.000	293.963.981	6.036.019	97,99
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	960.000.000	909.609.060	805.346.753	104.262.307	88,54
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	400.000.000	349.609.060	335.968.580	13.640.480	96,10
2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	400.000.000	349.609.060	335.968.580	13.640.480	96,10
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	560.000.000	560.000.000	469.378.173	90.621.827	83,82
2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	560.000.000	560.000.000	469.378.173	90.621.827	83,82
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.375.000.000	2.387.501.719	1.630.927.842	756.573.877	68,31
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	2.375.000.000	2.387.501.719	1.630.927.842	756.573.877	68,31
2.11.04.2.01.0003	Pengelolaan Kebun Raya	635.000.000	35.000.000	6.006.000	28.994.000	17,16
2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.060.000.000	1.460.000.000	1.061.175.406	398.824.594	72,68
2.11.04.2.01.0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	680.000.000	892.501.719	563.746.436	328.755.283	63,16
3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	150.000.000	347.000.000	50.156.203	296.843.797	14,45
3.28.04.2.01	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	150.000.000	347.000.000	50.156.203	296.843.797	14,45
3.28.04.2.01.0010	Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Penataan Blok TAHURA	150.000.000	347.000.000	50.156.203	296.843.797	14,45
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	375.000.000	375.000.000	340.730.367	34.269.633	90,86
2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	75.000.000	75.000.000	45.780.000	29.220.000	61,04
2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	75.000.000	75.000.000	45.780.000	29.220.000	61,04
2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	300.000.000	300.000.000	294.950.367	5.049.633	98,32
2.11.05.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	300.000.000	300.000.000	294.950.367	5.049.633	98,32





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	85.435.981.808	87.391.180.586	81.966.066.542	5.425.114.044	93,79
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	85.435.981.808	87.391.180.586	81.966.066.542	5.425.114.044	93,79
2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	400.000.000	400.000.000	263.766.000	136.234.000	65,94
2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	3.400.000.000	3.400.000.000	3.191.533.831	208.466.169	93,87
2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	39.006.709.808	39.006.709.808	36.060.217.685	2.946.492.123	92,45
2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	380.000.000	380.000.000	358.651.000	21.349.000	94,38
2.11.11.2.01.0015	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	27.749.272.000	29.704.470.778	28.580.480.386	1.123.990.392	96,22
2.11.11.2.01.0019	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	14.300.000.000	14.300.000.000	13.323.136.320	976.863.680	93,17
2.11.11.2.01.0021	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	200.000.000	200.000.000	188.281.320	11.718.680	94,14
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	3.354.920.000	3.767.991.447	3.263.366.778	504.624.669	86,61
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2.446.920.000	2.657.421.447	2.220.542.439	436.879.008	83,56
2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	643.920.000	518.920.000	432.947.946	85.972.054	83,43
2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	365.000.000	365.000.000	291.816.534	73.183.466	79,95
2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	1.438.000.000	1.773.501.447	1.495.777.959	277.723.488	84,34
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	122.000.000	122.000.000	100.960.000	21.040.000	82,75
2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	45.000.000	45.000.000	26.090.000	18.910.000	57,98
2.11.03.2.02.0002	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	77.000.000	77.000.000	74.870.000	2.130.000	97,23
2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	786.000.000	988.570.000	941.864.339	46.705.661	95,28
2.11.03.2.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	300.000.000	300.000.000	289.593.325	10.406.675	96,53
2.11.03.2.03.0007	Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi	165.000.000	165.000.000	139.488.829	25.511.171	84,54
2.11.03.2.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	321.000.000	523.570.000	512.782.185	10.787.815	97,94





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	702.000.000	491.770.940	442.788.873	48.982.067	90,04
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	702.000.000	491.770.940	442.788.873	48.982.067	90,04
2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	102.000.000	-	-	-	0,00
2.11.06.2.01.0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	350.000.000	241.770.940	213.170.000	28.600.940	88,17
2.11.06.2.01.0007	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	250.000.000	250.000.000	229.618.873	20.381.127	91,85
2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	75.000.000	75.000.000	20.532.000	54.468.000	27,38
2.11.07.2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	40.000.000	40.000.000	-	40.000.000	0,00
2.11.07.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	40.000.000	40.000.000	-	40.000.000	0,00
2.11.07.2.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	35.000.000	35.000.000	20.532.000	14.468.000	58,66
2.11.07.2.02.0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	35.000.000	35.000.000	20.532.000	14.468.000	58,66
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	240.000.000	342.000.000	308.120.097	33.879.903	90,09
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	240.000.000	342.000.000	308.120.097	33.879.903	90,09
2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	80.000.000	182.000.000	161.346.261	20.653.739	88,65
2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	80.000.000	80.000.000	71.626.904	8.373.096	89,53
2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	80.000.000	80.000.000	75.146.932	4.853.068	93,93
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	650.000.000	650.000.000	439.399.380	210.600.620	67,60
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	650.000.000	650.000.000	439.399.380	210.600.620	67,60
2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	650.000.000	650.000.000	439.399.380	210.600.620	67,60
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	288.000.000	288.000.000	202.141.600	85.858.400	70,19
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	288.000.000	288.000.000	202.141.600	85.858.400	70,19
2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	100.000.000	100.000.000	75.842.000	24.158.000	75,84
2.11.10.2.01.0006	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	188.000.000	188.000.000	126.299.600	61.700.400	67,18
TOTAL KESELURUHAN		119.339.495.250	122.692.770.404	111.716.391.632	10.976.378.772	91,05





2.1.1. Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target

Terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, beberapa kegiatan yang tidak memenuhi target sebagai berikut :

1. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh
2. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

2.1.2. Realisasi Program/Kegiatan yang memenuhi target

Adapun beberapa program dan kegiatan yang memenuhi target diantaranya :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup;
4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
6. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
7. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
8. Program Peningkatan Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat;
9. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
10. Program Pengelolaan Persampahan.





2.1.3 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya, atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Beberapa faktor yang menyebabkan tidak tercapainya beberapa program/kegiatan/sub kegiatan antara lain :

1. Kegiatan Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh belum ada penetapam dan masih proses menunggu perda oleh DPRD
2. Perencanaan yang tidak sesuai dengan pelaksanaan;
3. Target yang terlalu tinggi yang tidak dapat dikendalikan;
4. Proses penetapan TAHURA yang memakan waktu lama, terkait administrasi dan penebitan SK penetapan di TAHURA.

2.1.4 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra perangkat Daerah

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra perangkat Daerah merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian program Renstra Perangkat Daerah sebagai berikut :

1. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat pada umumnya;
2. Bagi program/ kegiatan yang tercapainya target berimplikasi kepada:
 - ✓ menurunnya tingkat pencemaran lingkungan hidup baik pencemaran udara, air maupun lahan;





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

- ✓ Semakin banyak pelaku usaha yang tertib terhadap perturan perundang/undangan lingkungan hidup, terlihat dari PROPER
- 3. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan perangkat daerah;
- 4. Tidak tercapainya target kinerja program berimplikasi terhadap target kinerja sasaran dan kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang telah ditetapkan dalam RENSTRA.

Adapun rekapitulasi hasil evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel TC.29 sebagaimana terlampir.





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

TC 29

REALISASI EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA

No	Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Capaian Program (Renstra -PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan tahun 2023			Perkiraan realisasi capaian target Renstra-PD s/d tahun berjalan 2024	
					Target Renja-PD tahun 2024	Realisasi Renja-PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi %	Target Program, kegiatan dan Realisasi capaian sub kegiatan s/d tahun berjalan Semester 1 (tahun 2025)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	63,56 Nilai	60,53	62	60,04	95,9	60,53	85
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana, Anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Dokumen	11	8 Dokumen	8	95,5	11 Dokumen	95
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2	2	2	100	2	100
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	4	5	5	91,25	5	100
	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	-	-	-	-	1	100
	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	-	-	-	-	1	100
	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara	-	-	-	-	1	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	-	-	-	-	1	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	12 Laporan	12					
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1260 Orang/Bulan	1040	1204	1395	100	12	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	16 Laporan	14	16	16	100	14	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	-	-	-	-	1	100
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan	-	-	-	-	1	100





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	2 Laporan	2					
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7 Laporan	11	12	12	100	7	100
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	-	-	-	-	1	100
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	-	-	-	-	1	100
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	-	-	-	-	1	100
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah								
Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	-	-	-	-	1	100
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	-	-	-	-	1	100
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen	3			100		
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	Stell	-	410	410	100	-	-
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Laporan	2	2	2	100	2 Dokumen	100
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat	Orang	19	20	20	100	20	100
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Dokumen	1					
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	35 Jenis	2	3	3	100	35 Paket	100
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	-	1	1	100	-	-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1.17 Jenis 2.150 Kotak 3.80 Kotak	6 Paket	2642 Paket	2642 Paket	100	252 Paket	100
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1. 3 jenis 2. 5.000 Lembar	1 Paket	5003 Paket	5003 Paket	100	5000 Paket	100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan, Peraturan Perundang-undangan dan Advetorial yang disediakan	528 Exemplar	4 Dokumen	-	-	-	-	-
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Bahan/Material yang disediakan	Jenis	6 Paket	4 Paket	4 Paket	100	5 Paket	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85 Orang	40	85 Laporan	85 Laporan	100	85 Laporan	100
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	3	20	20	100	-	-
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	-	1	1	100	1	100
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	2	1	100	1	100
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	Persen	100					
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1. Jumlah jenis 2. Jumlah unit	1. Jumlah jenis 2. Jumlah unit	75	20	20	100	56 Unit	100
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit	-	2	2	100	0	100
Pengadaan Meubel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	-	148	148	100	0	100
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	-	1	1	100	0	100





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	12					
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	12	12	12	100	12	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bulan	12	12	12	100	12	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	66,5 Persen	60					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak	1 Unit	11	1	1	100	1	100
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	9	1	0	0	57	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	Unit	2	20	16	80	2	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	uni	-	1	1	100	0	100
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang disusun	100 Persen	60					
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Tersusunnya RPPLH	4 Dokumen	1					
	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	2 Dokumen	3	2	2	100	3	100
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Streategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Terselenggaranya KLHS	1 Dokumen	1					
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	1. Jumlah Dokumen 2. Jumlah data	1 Dokumen	2	1	1	100	-	-
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah pohon yang ditanam pada program penanaman satu juta pohon pada wilayah penghijauan dan reklamasi	200000 Pohon	2000					
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2 Dokumen	4					
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2 Dokumen	2	2	2	100	2	100
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1	1	1	100	1	100
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1	1	1	100	1	100
	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1 Lpaoran	1					
	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah laporan sosialisasi informasi pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat	1 Laporan	1	1	1	100	1	100
	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Lokasi Pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup lahan terkontaminasi yang diisolasi	5 Lokasi	34	25	26	100	25	100
	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	50 Lokasi	43	-	-	-	50	100





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1 dokumen	1					
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	1 Dokumen	1	1	1	100	1	100
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	1 Dokumen	1	-	-	-	-	-
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	1 Dokumen	2	1	1	100	1	100
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	1 Dokumen	1	1	1	100	1	100
	Pelaksanaan Restorasi	luas area yang dilakukan restorasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Ha	-	-	-	-	2	100
	Pelaksanaan Rehabilitasi	luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Ha	-	-	-	-	5	100
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase pemenuhan ruang terbuka hijau terhadap luas perkotaan	20 Persen	20					
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keanekaragaman hayati Kabupaten Kota	24,19 Pesen	2					
		Tercapainya penanaman dan pemeliharaan pengelolaan keanekaragaman hayati	Dokumen						
	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen rencana induk pengelolaan Kehati yang disusun	Dokumen	0	-	-	-	1	100
	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas Taman Kehati yang dikelola diluar kawasan Hutan	13 Hektar	18	27	54	100	1 Unit	100
	pengelolaan kebun raya	Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Hektar	0	5	0	0	2 Ha	50
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan	25 Hektar	10	8,5	11	100	25 Ha	100
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah sarana dan prasarana keanekaragaman hayati yang dikelola	15 Unit	12	-	-	-	15	100
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Jumlah Dokumen Kajian timbulan limbah B3 dari kegiatan UMKM yang menghasilkan limbah B3 di kabupaten Kutai Kartanegara	3 Dokumen	4					
	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah pelaku usaha	50 Pelaku Usaha	50					
	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	50 Laporan	4	50	29	58	50	100
	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha pengumpul limbah B3	50 Pelaku Usaha	50					
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewangannya	40 Laporan	4 Dokumen	2	2	100	3 Dokumen	100





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	19,32 Persen	19,32					
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah pembinaan/pengawasan yang dilakukan terhadap jumlah izin usaha yang diterbitkan	20 Persen	20					
Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah ASN yang dilakukan pelatihan peningkatan kapasitas PPLHD dan diangkat menjadi fungsional PPLHD	9 Orang	9	9	20	100	9	100
Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	Orang	-	-	-	-	3	100
Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	120 Laporan	120	75	108	100	75	100
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD	20 Dokumen	20	0	-	-	0	100
Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	120 Dokumen	0	0	-	-	0	100
PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase Penetapan Hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Kabupaten /Kota	75 Persen	75					
Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase Penetapan Hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Kabupaten /Kota	70 Persen	75					
Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	5 Dokumen	5	6	0	0	5	50
Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat hukum adat	70 Persen	70					
Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan pemberdayaan, kemitraan, pendampingan dan penguatan	1 Dokumen	1	1	2	100	1	100





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diberikan pendidikan/pelatihan/penyuluhan	35 Lembaga	35					
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah diklat dan penyuluhan yang diberikan kepada lembaga kemasyarakatan yang ada di satu kabupaten/kota	35 kali	35					
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	2 Lembaga	2	2	2	100	2	100
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	53 Dokumen	53	30	30	100	30	100
	Penyelenggaraan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	325 Orang	241	300	300	100	325	100
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	1. Jumlah Desa/kelurahan yang mendapatkan penghargaan desa ramah lingkungan kategori utama	5 Desa/Kelurahan	5					
		2. Jumlah Penghargaan Yang Diberikan	129 Penghargaan	126					
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Penghargaan yang diberikan kepada Masyarakat/Dunia Usaha/Lembaga Lainnya	2 jenis	2					
	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	124 Entitas	178	131	131	100	124	100
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah Kabupaten/Kota yang ditangani	98 Persen	96					
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pengaduan masyarakat di Bidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti	50 Laporan	50					
	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani	Pengaduan	28	20	36	100	20	100
	Penerapan Sanksi Administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangankabupaten/kota	Perkara	-	20	37	100	20	100
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	25 Dokumen	18	-	-	-	10 Pekara	100





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1. Jumlah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Yang Dibangun	1 Lokasi	2					
	2. Timbunan sampah	99,52 Persen	94,84					
Pengelolaan Sampah	1. Persentase Jumlah sampah yang ditangani	70 Persen	50					
	2. Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	28,30 Pesen	72					
	3. Persentase cakupan area pelayanan	72,22 Persen	21					
Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kebijakan dan strategi daerah pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang disusun dan ditetapkan	3 Dokumen	3	3	3	100	4	100
Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah laporan hasil Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	1 Laporan	4	14 Ton	14 Ton	100	47 Ton	100
Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	60529,994 Ton	59,00	80 Unit	80 Unit	100	3247 Unit	100
Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah masyarakat, kelompok masyarakat atau para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat	5 Kelompok	5	5	5	100	5	100
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	2 Dokumen	5	5	5	100	5	100
Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	2 Dokumen	3	2	2	100	2	100
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	19 Unit	3,748	11,676	11,676	100	2856	100
PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase Penyelesaian Perencanaan Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura)	0 Dokumen 1 Kegiatan	16,67					
Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	Dokumen	1					
Penyusunan rencana pengelolaan dan penataan blok TAHURA	Jumlah Peta Blok Pengelolaan dan Penataan Wilayah Kerja dari TAHURA berdasarkan Hasil Penataan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	0	15	-	-
PENGELOLAAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA BESERTA HABITATNYA DI TAHURA KABUPATEN/KOTA	Luas kawasan TAHURA yang diinventarisasi dan Diverifikasi dengan nilai Kehati tinggi	Hektar	-	-	-	-	3.261	85
Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Kabupaten/Kota	Jumlah Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	-	-	1	85
Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi produktif	Desa	-	-	-	-	1	85
Perencanaan Pengelolaan TAHURA	Perencanaan Pengelolaan TAHURA	Dokumen	-	-	-	-	2	85





2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup merupakan pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Adapun hasil analisis kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat pada Tabel TC 30 berikut

IKU	SATUAN	TARGET			REALISASI		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	57.32	57,42	57.52	53.08	50,53	52,05
Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	88.78	88,89	88.89	88.78	91,53	92,73
Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks	71.38	72,49	73.89	71.38	74,62	75,17
Penurunan Emisi GRK (CO2 EQ)	CO2 EQ	18.640	19640	19.531	18640,78	22.940	497.371





2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi perangkat daerah

Lingkungan hidup merupakan semua hal yang berada di sekitar kehidupan manusia yang keberadaannya secara langsung maupun tidak langsung sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup dinyatakan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia, dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Lingkungan hidup yang serasi sangat kita perlukan karena merupakan unsur penentu kehidupan suatu bangsa. Oleh karena itu, kita wajib menjaga dan melestarikan lingkungan hidup untuk dimanfaatkan dalam memenuhi kepentingan bersama bagi generasi saat ini dan akan datang. Dengan demikian, setiap pemanfaatan lingkungan hidup harus bertujuan :

- a. Tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidupnya;
- b. Terwujudnya manusia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindakan melindungi serta membina lingkungan hidup;
- c. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- d. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana.

Apabila setiap pemanfaatan lingkungan hidup dapat mengacu kepada lima hal di atas maka lingkungan hidup akan selalu terjaga dan dapat dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat saat ini maupun untuk masa yang akan datang.

Meningkatnya jumlah penduduk yang sangat cepat, menyebabkan peningkatan berbagai kebutuhan hidup, mulai dari pangan, sandang dan papan serta permukiman. Disamping itu, kebutuhan sumber daya alam





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

lainnya seperti tanah, air, energi, mineral dan lainnya dieksploitasi dari persediaan sumber daya alam di bumi.

Eksplorasi sumber daya alam yang berlebihan untuk kepentingan manusia menyebabkan semakin menipisnya sumber daya alam dan berbagai permasalahan lingkungan seperti perusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup. Permasalahan lingkungan yang di hadapi akibat pembangunan menyebabkan kualitas lingkungan yang semakin menurun di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Isu-isu lingkungan tersebut terutama berkaitan dengan masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan, pengarusutamaan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) bagi seluruh sektor yang ditempuh dalam setiap kebijakan pembangunan dalam rangka menciptakan terjaminnya keseimbangan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, serta menurunnya kualitas dan kuantitas sumber daya alam.

Dalam pengelolaan lingkungan hidup, salah satu hal penting yang harus menjadi perhatian utama dalam pengelolaan lingkungan tersebut adalah sejauhmana diterapkannya prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan yang baik (*Good Environmental Governance*), maknanya secara ringkas adalah bagaimana pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang menjamin adanya kesadaran dan komitmen yang kuat dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan secara adil, bijaksana, efisien, efektif, aspiratif dan responsif yang didasarkan pada prinsip-prinsip *Good Governance*, konkretnya adalah bahwa setiap rencana, program, dan proyek pembangunan senantiasa memasukkan pertimbangan-pertimbangan pelestarian fungsi daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Permasalahan lingkungan cukup rumit dan berdimensi luas seyogyanya menjadi isu prioritas suatu daerah dan perlu intervensi mengatasi permasalahan tersebut karena menyangkut lintas ruang/wilayah, lintas pelaku/sektor, dan lintas generasi dimana dampaknya tidak mengenal batas ruang/wilayah,





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

diakibatkan oleh multi sektor/multi pelaku dan permasalahan lingkungan ini dapat dirasakan akibatnya antar generasi.

Dalam penentuan isu prioritas lingkungan hidup di Kabupaten Kutai Kartanegara, terlebih dahulu dilakukan identifikasi isu-isu utama lingkungan hidup di Kabupaten Kutai Kartanegara. Berdasarkan hasil metaplan, teridentifikasi tiga belas (13) isu utama permasalahan lingkungan di Kabupaten Kutai Kartanegara, antara lain :

1. Eksploitasi sumber daya batubara secara terbuka (*open pit*) secara besar-besaran yang berakibat pada tingginya tingkat degradasi lahan.
2. Tingginya tingkat sedimentasi di kawasan tiga danau yaitu Danau Jempang, Danau Semayang dan Danau Melintang.
3. Semakin rusaknya habitat di kawasan Delta Mahakam akibat sedimentasi dan abrasi.
4. Masih kurangnya kesadaran dan belum sebandingnya ketersediaan SDM serta sarana dan prasarana dalam memberikan layanan kebersihan dibandingkan dengan timbulan sampah.
5. Fenomena iklim yang tidak menentu akibat terjadinya perubahan iklim secara global.
6. Tingginya tingkat pencemaran sungai Mahakam dan anak-anak sungainya sehingga sulit untuk memenuhi baku mutu.
7. Belum adanya kajian teknis terkait ketersediaan air menyambut penetapan wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Ibukota Negara bersama dengan Kabupaten Panajam Paser Utara (PPU).
8. Tingginya tingkat okupasi lahan di wilayah rencana Ibukota Negara khususnya dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
9. Kurangnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah sejak dari sumbernya dengan menerapkan program 3 R (*reuse, reduce, dan recycle*).
10. Semakin berkurangnya potensi pemanfaatan jasa lingkungan akibat perubahan iklim seperti banjir dan kekeringan.





11. Tingginya tingkat kebakaran hutan akibat kemarau yang berkepanjangan.
12. Semakin rusaknya habitat beberapa satwa endemik yang berpotensi terhadap semakin berkurangnya keanekaragaman hayati.
13. Potensi longsor disepanjang sempadan sungai Mahakam dan anak-anak sungainya cukup tinggi.

Isu-isu strategis permasalahan lingkungan seperti tersebut di atas perlu adanya intervensi agar tidak menimbulkan permasalahan lain yang lebih besar dan berdampak luas bagi lingkungan dan masyarakat. Namun demikian, mengingat keterbatasan tenaga, waktu dan biaya maka permasalahan- permasalahan tersebut tidak dapat ditanggulangi secara bersama-sama sehingga perlu ditetapkan isu prioritas dalam penanganan permasalahan lingkungan tersebut. Isu strategis adalah isu yang sangat urgen dan mendesak untuk diintervensi dalam rangka memperbaiki kualitas lingkungan hidup di daerah. Disebut sebagai isu prioritas atau isu strategis karena apabila tidak diantisipasi dan diperbaiki akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Penetapan isu prioritas atau isu strategis lingkungan hidup difokuskan pada permasalahan terkait lingkungan hidup yang telah, sedang dan/atau akan terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara. Penentuan isu prioritas/strategis ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan di daerah. (*sumber : Dokumen DIKPLHD DLHK Kab Kukar*)

2.4. Review terhadap rancangan RKPD

Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah (RKPD) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan langkah penyempurnaan terhadap rancangan kerja bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) pada Tahun 2026 dengan memperhatikan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. RKPD juga merupakan landasan kegiatan perencanaan pembangunan tahunan yang berisi Program dan kegiatan sebagai pedoman dalam melaksanakan urusan , tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Pada Tahun 2024, Program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara terjadi perubahan Nomenklatur Program dan Kegiatan menyesuaikan dengan Permendagri 90 Tahun 2019 Tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2026 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Pada Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 akan di sinkronisasi dengan rancangan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga menjadi rumusan program dan kegiatan yang definitif untuk dijadikan rencana kerja Tahun 2026.

Berkut ini adalah tabel review Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Tabel TC 31
REVIEW TERHADAP RENCANA KERJA (RENJA) RKPd TAHUN 2026
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
OPD: DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Rancangan Akhir Renja 2026							
No	Program/Kegiatan	lokasi	Indikator	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	10
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	61,9	Nilai	23.341.593.838,00	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Dokumen Rencana, Anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11	Dokumen	500.000.000,00	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	150.000.000,00	Disesuaikan dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Laporan	100.000.000,00	Disesuaikan dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya
3	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen	50.000.000,00	Disesuaikan dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya Penambahan Sub kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
4	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1	Data	100.000.000,00	Disesuaikan dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya Penambahan Sub kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
5	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Berita Acara	50.000.000,00	Disesuaikan dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya Penambahan Sub kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan LaporanCapaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	50.000.000,00	Disesuaikan dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya Penambahan Sub kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	12	Laporan	19.253.323.219,00	
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	Orang/Bulan	18.973.323.219,00	Disesuaikan dengan pagu Gaji tahun 2024, Penambahan ASN peralihan dari Perkim sebanyak 33 Orang , Proses Rekon Gaji dilakukan di pertengahan tahun
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	16	Laporan	205.000.000,00	Laporan rekonsiliasi adalah kertas kerja laporan triwulan, semester dan Tahunan, tidak ada perubahan dengan rancangan awal
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	Laporan	50.000.000,00	Disesuaikan dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya Penambahan Sub kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
10	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	25.000.000,00	Disesuaikan dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya Penambahan Sub kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	2	Laporan	135.000.000,00	
11	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6	Laporan	50.000.000,00	Menyesuaikan dengan evaluasi pagu tahun sebelumnya
12	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	Dokumen	25.000.000	Penambahan Sub kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
13	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	3	Laporan	50.000.000,00	Penambahan Sub kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
14	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	10.000.000,00	Penambahan Sub kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
1.4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Prosentase Wajib Retribusi Daerah yang diadministrasikan (Jlh yang diadministrasikan : Jlh Potensi Wajib Retribusi)	100	Prosentase	100.000.000	
15	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	1	Laporan	25.000.000	Disesuaikan dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya Penambahan Sub kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
16	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1	Dokumen	50.000.000	Disesuaikan dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya Penambahan Sub kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
17	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1	Dokumen	25.000.000	Disesuaikan dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya Penambahan Sub kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
1.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	3	Dokumen	275.000.000,00	
18	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2	Dokumen	25.000.000,00	Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian tidak ada perubahan dengan rancangan awal
19	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30	Orang	200.000.000,00	Tindak lanjut dari perjanjian kinerja Esselon II butir ke 14 "Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun, Bimtek Arsip dinamis, bimtek Pengelolaan keuangan, Renstra, Pengelolaan Aset daerah,
20	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	15	Orang	50.000.000,00	Penambahan Sub kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
1.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Dokumen Laporan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	Dokumen	735.000.000,00	
21	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	25	Jenis	15.000.000,00	Disesuaikan dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya Penambahan Sub kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
22	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	100.000.000,00	Bertambahnya beban kerja menjadikan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor berupa Alat Tulis Kantor semakin meningkat
23	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	30.000.000,00	Penambahan pagu Bahan Logistik Kantor di karena adanya peningkatan kebutuhan





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

24	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	40.000.000,00	Penambahan Pagu untuk Peningkatan Kualitas Cetakan Map berwarna , untuk Penggandaan SK PHL per triwulan dan Cetak Baliho Untuk Event
25	Penyediaan Bahan/Material	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3	Paket	150.000.000,00	Untuk Mendanai Kegiatan Pameran Merah Putih, Pameran Erau, Pameran Pelaksanaan Lingkungan Tingkat Kabupaten dan Nasional
26	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	95	laporan	250.000.000,00	Hasil Evaluasi Anggaran tahun 2023, kebutuhan biaya perjalanan dinas rapat koordinasi tidak mencukupi dengan adanya undangan rapat , rakor dsb nya yang di laksanakan di dalam dan di luar provinsi , di tambah dengan jumlah ASN pelimpahan dari Opd perkim
27	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Dokumen	50.000.000,00	Untuk Mendukung Pengelolaan Arsip Dinamis
28	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen	100.000.000,00	Pengembangan Website Perangkat Daerah dengan menambah Fitur update data dan pembuatan Aplikasi Pembayaran pengujian Sample pada UPTD Laboratorium
1.7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah			455.790.000,00	
29	Pengadaan Mebel	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	75	Unit	350.000.000,00	Masih Kurang nya Meja Kerja, Kursi serta Lemari Arsip yang layak untuk mencukupi Kebutuhan seluruh karyawan serta rusak berat dan bertambahnya jumlah ASN yang tidak sebanding di tambah dengan peralihan 33 ASN dari OPD perkim dengan jumlah sarana dan prasarana yang ada
30	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100	Unit	105.790.000	Pengadaan AC, PC Unit, Printer, CCTV, laptop
1.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12	Bulan	708.150.569,00	
31	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	500.037.954	Adanya kenaikan tarif dasar listrik dan penambahan pemakaian untuk suplay listrik, Air ,Internet dan TV kabel di bangunan Gedung Perkim yang di alihkan ke DLHK
32	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	208.112.615	Penambahan 16 orang tenaga THL pelimpahan dari OPD perkim dan Belanja Pihak Ketiga untuk Cleaning Service
1.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	64,5	Persen	879.330.050,00	
33	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10	Unit	224.330.050	Disesuaikan dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya Penambahan Pagu Kebutuhan Pagu anggaran untuk Biaya operasional sebanyak 5 unit
34	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2	Unit	10.000.000	Untuk Pemeliharaan kendaraan dinas operasional sebanyak 2 unit
35	Pemeliharaan Mebel	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah unit yang dipelihara	30	Unit	20.000.000	Penambahan Sub kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
36	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1	Unit	25.000.000	Penambahan Sub kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
37	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40	Unit	100.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan seperti AC, Komputer dan Printer dan Genset





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

38	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarama	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	4	Unit	500.000.000	Pemintaan pagu untuk kebutuhan rehab gedung sekretariat dan ruang rapat dlhk
1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarama	Jumlah Produk Layanan Yang Terakreditasi	1	Produk	300.000.000	
39	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarama	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja	300.000.000	Penambahan Sub kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
II	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Kabupaten Kutai Kartanegara	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang disusun	4	Dokumen	800.000.000,00	
1.11	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Kabupaten Kutai Kartanegara	Tersusunnya RPPLH	3	Dokumen	650.000.000,00	
40	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1	Dokumen	200.000.000	Untuk Pengendalian RPPLH, DIKPLH dan IKLH 2025
41	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Kabupaten Kutai Kartanegara	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan	1	Dokumen	150.000.000,00	Penambahan Sub kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
42	Penyusunan dokumen rencana tematik berbasis arahan RPPLH	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen RPPMA, RPPMU, RPPML, RPPEG, RPPKarst yang ditetapkan	1	Dokumen	300.000.000	Penambahan Sub kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
1.12	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Streategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Kabupaten Kutai Kartanegara	Terselenggaranya KLHS	1	Dokumen	150.000.000,00	
43	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1	Dokumen	150.000.000	Penambahan Sub kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
III	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah pohon yang ditanam pada program penanaman satu juta pohon pada wilayah penghijauan dan reklamasi	200000	Pohon	4.882.611.000,00	
1.13	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	4	Dok	2.725.000.000,00	
44	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	3	Dokumen	400.000.000	
45	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1	Dokumen	350.000.000	
46	Pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kabupaten Kutai Kartanegara	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	19	Lokasi	250.000.000	Penambahan Sub kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
47	Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan	3	Unit	175.000.000	Penambahan Sub kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
48	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1	Dokumen	1.550.000.000,00	Penambahan untuk Pemeliharaan alat AAS, Spektrofotometri, Aquadest dan kalibrasi alat serta pengadaan peralatan uji laboratorium untuk penambahan parameter (pengadaan Mikroskop dan Furnace).
1.14	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah laporan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1	Laporan	223.000.000,00	





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

49	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah laporan sosialisasi informasi pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat	1	Laporan	50.000.000	Menyesuaikan dengan evaluasi pagu tahun sebelumnya
50	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Lokasi Pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup lahan terkontaminasi yang diisolasi	25	Lokasi	88.000.000	Menyesuaikan dengan evaluasi pagu tahun sebelumnya
51	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	25	Titik	85.000.000	Menyesuaikan dengan evaluasi pagu tahun sebelumnya
1.15	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1	Dokumen	1.934.611.000,00	
52	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	1	Dokumen	760.000.000,00	Menyesuaikan dengan evaluasi pagu tahun sebelumnya
53	Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi	Kabupaten Kutai Kartanegara	Dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi	20	Kegiatan	50.000.000,00	Sub Kegiatan ini di mutakhirkan dan di pecah menjadi 2 sub kegiatan
54	Pelaksanaan Rehabilitasi	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Luas daerah Penanaman dan Jumlah Bibit yang ditanam	5	Ha	604.146.000,00	Penambahan untuk pembelian Bibit, Ongkos Tanam, dan Pemeliharaan, Melaksanakan Rehabilitasi Terkait sanksi terhadap DLHK pada tahun 2023 yang belum dapat di selesaikan karena terkedala anggaran yang tidak mencukupi, serta mengakomodir Usulan Musrenbang yang telah menjadi Prioritas
55	Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi	Kabupaten Kutai Kartanegara	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	15	Kegiatan	75.000.000,00	Sub Kegiatan ini di mutakhirkan dan di pecah menjadi 2 sub kegiatan Penbahan pagu untuk koordinasi ke BWS, BPDAS, P3EKA, DLH Prov, Rakor
56	Pelaksanaan Restorasi	Kabupaten Kutai Kartanegara	luas area yang dilakukan restorasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	4	Ha	445.465.000,00	Pagu Penambahan di butuhkan untuk membersihkan Gulma di sungai mangkurawang Tenggarong karena akses masuk ke dalam sungai sudah tertutup oleh banyak nya gulma dan pohon-pohon yang tumbang, serta untuk mengkomodir Usulan Musrenbang Kecamatan yang telah menjadi prioritas
IV	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Kabupaten Kutai Kartanegara	Persentase pemenuhan ruang terbuka hijau terhadap luas perkotaan	20	Persen	9.198.506.000,00	
1.16	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keanekaragaman hayati Kabupaten Kota	1	Dokumen	9.198.506.000,00	
		Kabupaten Kutai Kartanegara	Tercapainya penanaman dan pemeliharaan pengelolaan keanekaragaman hayati	50	Persen		
57	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen rencana induk pengelolaan Kehati yang disusun	1	Dokumen	250.000.000,00	Dokumen Rencana Pengelolaan Kehati menjelaskan tentang pengelolaan Kehati di kabupaten Kukar dan dokumen ini sebagai tindak lanjut dokumen Profil kehati di tahun 2020
58	pengelolaan kebun raya	Kabupaten Kutai Kartanegara	Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	5	Ha	300.000.000,00	Akan melaksanakan Penyusunan Dokumen Rencana Pengelolaan Kebun Raya, sisa pagu akan di alihkan Ke Sub Kegiatan lainnya





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

59	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kabupaten Kutai Kartanegara	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan	15	Ha	7.898.506.000	Berdasarkan data yang dimiliki bahwa luas RTH Publik, Privat, Taman Bermain dan Hutan Kota termasuk RTH di Pemukiman di Kecamatan Tenggarong seluas 150,140 ha. Untuk Kecamatan Tenggarong Seberang, pengelolaan RTH hanya pada median jalan jalur 2 menuju ke Samarinda seluas 1,6 ha serta untuk Pemeliharaan Taman yang baru di serahkan kepada DLHK di akhir tahun 2024 serta belum teranggarkan yaitu Taman Kota Raja, Taman Eks Tanjung dan Landscave Diponegoro (TS Sekda).
60	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah orang yang meningkat kapasitasnya dalam pengelolaan keanekaragaman hayati	30	Orang	100.000.000,00	Penentuan Lokasi di sesuaikan dengan kelompok temak kelulut yang sudah mendapatkan bantuan di tahun2020- 2023, Kegiatan yang akan di laksanakan adalah Peningkatan Kapasitas Peternak madu kelulut, Penambahan pagu di karenakan menyesuaikan dengan materi peningkatan kapasitas
61	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah sarana dan prasarana keanekaragaman hayati yang dikelola	1	Unit	650.000.000,00	Penyesuaian Target capaian dari belanja pupuk, bibit dan sebagainya menjadi rencana pembangunan Gazebo dan Pos keamanan
V	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Kajian timbulan limbah B3 dari kegiatan UMKM yang menghasilkan limbah B3 di kabupaten Kutai Kartanegara	4	Dokumen	475.000.000,00	
1.17	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah pelaku usaha	50	Pelaku usaha	100.000.000,00	
61	Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	50	Usaha	100.000.000	Bahwa Kegiatan verifikasi lapangan dilakukan tidak hanya pada Permohonan Baru tetapi dilakukan Verifikasi pada Tempat Penyimpanan Limbah B3 yang sudah Beroperasi di dalam wilayah kabupaten Kutai Kartanegara
1.18	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Pelaku Usaha pengumpul limbah B3	50	Pelaku usaha	375.000.000,00	
62	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	40	Dokumen	375.000.000,00	Kegiatan Koordinasi dengan Propinsi dan KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup) dalam Pengelolaan dan Kebijakan skala Propinsi dan Nasional





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

VI	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Kabupaten Kutai Kartanegara	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	19,32	Persen	180.000.000,00	
1.19	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Kutai Kartanegara	Persentase jumlah pembinaan/pengawasan yang dilakukan terhadap jumlah izin usaha yang diterbitkan	20	Persen	180.000.000,00	
63	Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah PNS yang dibentuk dandiangkat menjadi Fungsional PPLHD	1	Orang	30.000.000,00	Tambahan/pembentukan PPLH dalam rangka meningkatkan kinerja pengawasan, Sesuai Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
64	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	120	Badan Usaha	150.000.000,00	Target Menyesuaikan dengan pemutakhiran Perhitungan Target Ikk Lppd Tahun 2024
VII	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Kabupaten Kutai Kartanegara	Persentase Penetapan Hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Kabupaten / Kota	75	Persen	75.000.000,00	
1.20	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Kabupaten Kutai Kartanegara	Persentase Penetapan Hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Kabupaten / Kota	75	Persen	40.000.000,00	
65	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	5	Dokumen	40.000.000,00	Pagu Tidak ada perubahan dari rancangan awal
1.21	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Kabupaten Kutai Kartanegara	Persentase peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat hukum adat	70	Persen	35.000.000,00	
66	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	1	Dokumen	35.000.000,00	Pagu Tidak ada perubahan dari rancangan awal
IX	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diberikan pendidikan/pelatihan/penyuluhan	35	Lembaga	480.000.000,00	





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

1.22	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah diklat dan penyuluhan yang diberikan kepada lembaga kemasyarakatan yang ada di satu kabupaten/kota	35	kali	480.000.000,00	
67	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	24	Lembaga	80.000.000,00	Pagu Tidak ada perubahan dari rancangan awal
68	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	20	Dokumen	100.000.000,00	Perlunya insentif bagi sekolah yang berprestasi dalam melaksanakan program Gerakan Peduli dan Berbudaya (GPB) LH
69	Penyelenggaraan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	150	Orang	300.000.000,00	Menyesuaikan dengan evaluasi Sebelumnya
X	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Kabupaten Kutai Kartanegara	1. Jumlah Desa/kelurahan yang mendapatkan penghargaan desa ramah lingkungan kategori utama	5	Desa/ Kelurahan	200.000.000,00	
		Kabupaten Kutai Kartanegara	2. Jumlah Penghargaan Yang Diberikan	128	Penghargaan		
1.23	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Jenis Penghargaan yang diberikan kepada Masyarakat/Dunia Usaha/Lembaga Lainnya	2	Jenis	200.000.000,00	
70	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	100	Entitas	200.000.000,00	Penambahan dialokasikan untuk membiayai insentif bagi desa/kelurahan yang mendapatkan predikat DESA/KELURAHAN IDAMAN dan tim pembina dan penilai Desa Ramah lingkungan diluar Tim yang ada di DLHK
XI	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Kabupaten Kutai Kartanegara	Persentase Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah Kabupaten/Kota yang ditangani	97	Persen	280.000.000,00	
1.24	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah laporan Pengaduan masyarakat di Bidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota yang ditindaklanjuti	50	Laporan	280.000.000,00	
71	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	15	Pengaduan	50.000.000,00	Pagu Tidak ada perubahan dari rancangan awal





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

72	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangankabupaten/kota	15	Sanksi	50.000.000,00	Meyesuaikan dengan Evaluasi Kegiatan Tahun Sebelumnya
73	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	20	Perkara	180.000.000,00	Perubahan, Pemutakhiran Sub Kegiatan dari 2 sub kegiatan menjadi 1 Sub Kegiatan
XII	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Kabupaten Kutai Kartanegara	1. Jumlah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Yang Dibangun	1	Lokasi	171.906.000.000,00	
		Kabupaten Kutai Kartanegara	2. Timbulan sampah	97,64	Persen		
1.25	Pengelolaan Sampah	Kabupaten Kutai Kartanegara	1. Persentase Jumlah sampah yang ditangani	72	Persen	171.906.000.000,00	
			2. Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	12,73	Persen		
			3. Persentase cakupan area pelayanan	61,11	Persen		
74	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen Kebijakan dan strategi daerah pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang disusun dan ditetapkan	3	Dokumen	950.000.000,00	1. Kesesuaian Kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan oleh Pihak Tenaga Ahli, Perbub Pengelolaan sampah dan Laporan Capaian Kebijakan Pengelolaan Sampah, Penambahan 1 peraturan bupati
75	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	21	Ton	30.030.000.000	Pembangunan TPS3R dan Sarana Pendukungnya , pembangunan TPS3R belum ada di Tenggarong dan ini sifatnya wajib untuk mendukung Adipura Kabupaten, serta mengakomodir Usulan Musrenbang yang telah menjadi SUPER PRIORITAS (TPS3R) di 5 Kecamatan
76	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpeliharadengan baik	1252	Unit	6.000.000.000	1. Berdasarkan evaluasi tahun 2024 penambahan pagu terdapat penganggaran gaji PHL untuk pemenuhan 19 kecamatan masing2 10 orang per kecamatan, untuk pemenuhan Sapras 2. renc memindahkan anggaran pembangunan
77	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	5	Kelompok	150.000.000,00	Penambahan pagu untuk Melaksanakan event agen lingkungan dan memberikan penghargaan serta menentukan duta sampah, pembuatan dokumenter iklan layanan masyarakat
78	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	2	Dokumen	1.900.000.000,00	Penambahan lokasi Penyusunan Fsdan Dokumen DED, UKL-UPL pada 7 Kegiatan (Penyusunan FS dan DED TPST PDU samboja, Anggana,muara kaman, tenggarong, penyusunan dokumen UKL-UPL Amdal Kec tenggarong, DED Kec Tenggarong, UKL-UPL amdal TPA Bekotok)
79	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	11411	Unit	102.326.000.000,00	Penambahan pagu untuk Penambahan peralatan kebersihan , pakaian PHL, landasan bak kontainer, tps 3 warna





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

80	Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota	25	Dokumen	150.000.000,00	Penambahan Sub kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
81	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Kabupaten Kutai Kartanegara	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	41	Persentase	30.400.000.000,00	Penambahan Sub kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
XIII	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Muara Kamam, Muara Siran	Persentase Penyelesaian Perencanaan Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura)	16,67	Persen	2.775.000.000,00	
1.24	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	Muara Kamam, Muara Siran	1. Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	1	Dokumen	2.775.000.000,00	
82	Perencanaan Pengelolaan TAHURA	Muara Kaman, Kota Bangun , Kembang Janggut	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan TAHURA (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang Disusun dan Ditetapkan	1	Dokumen	250.000.000,00	Dokumen pengelolaan tahura baik jangka panjang dan jangka pendek akan memberikan arahan dan kebijakan dalam pengelolaan tahura untuk jangka waktu tertentu sehingga pengelolaan tahura dapat tercapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
83	Kerja Sama Penyelenggaraan Tahura Kabupaten/Kota	Muara Kaman, Kota Bangun , Kembang Janggut	Jumlah Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Kabupaten/Kota	1	Dokumen	75.000.000,00	Menyesuaikan dengan Evaluasi Kegiatan Sebelumnya
84	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Tahura Kabupaten/Kota	Muara Kaman, Kota Bangun , Kembang Janggut	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi produktif	1	Desa	200.000.000,00	Sesuai dengan pagu ranwal tidak ada penambahan
85	Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa beserta habitatnya di Tahura Kabupaten/Kota	Muara Kaman, Kota Bangun , Kembang Janggut	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi produktif	25	Hektar	250.000.000,00	Penambahan Sub kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
86	Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota	Muara Kaman, Kota Bangun , Kembang Janggut	Luas Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota yang diamankan	3261	Ha	1.500.000.000	Penambahan Sub kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
87	Penataan kawasan Tahura Kabupaten/Kota	Muara Kaman, Kota Bangun , Kembang Janggut	Jumlah Peta Blok Pengelolaan dan Penataan Wilayah Kerja dari TAHURA berdasarkan Hasil Penataan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota	1	Dokumen	500.000.000	Penambahan Sub kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
						214.593.710.838,00	
selisih						-	

214.593.710.838,00

214.593.710.838,00
214.593.710.838,00





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Semakin kompleksnya permasalahan di Bidang lingkungan hidup memerlukan berbagai masukan dari berbagai pihak baik dari masyarakat, LSM, Institusi pendidikan dan instansi pemerintah terkait lainnya. Usulan program dan kegiatan masyarakat ini diperoleh dari musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan, dan Forum Perangkat Daerah Daerah yang dilakukan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Sampai pada saat dokumen ini disusun proses penelaahan usulan masih berlangsung (masyarakat)

HASIL VERIFIKASI MUSRENBANG KECAMATAN TAHUN 2026								
No	Kamus usulan		Jumlah Usulan	Super Prioritas	Prioritas	Belum Prioritas	Ditolak	Di Kembalikan
1	Pengadaan Kendaraan Alat Angkut Sampah (Kendaraan Bermotor Roda Tiga)	Kembang Janggut, Kenohan, Kota Bangun, Kota Bangun Darat, Loa Kulu, Muara Badak, Muara Jawa, Muara Kaman, Muara Muntai, Muara Wis, Samboja, Samboja Barat, Sebulu, Tabang, Tenggarong,	41	-	40	1	-	-
2	Pembangunan TPS3R dan sarana pendukungnya	Kembang Janggut, Kota Bangun Darat, Loa Janan, Muara Badak Muara Muntai, Muara Wis, Sanga-sanga, Tabang, Tenggarong, Tenggarong Sebrang	13	5	2	6	-	-
3	Penanaman Pohon/Penghijauan Untuk Pelindung Kampung	Kota Bangun Darat, Marang Kayu Muara Jawa, Muara Kaman Muara Muntai, Muara Wis, Tenggarong, Tenggarong Sebrang	8	-	7	-	1	-
4	Pencacah Sampah Organik	Kota Bangun, Loa Janan, Marang Kayu, Muara Kaman, Muara Muntai, Tenggarong	12	-	6	5	1	-
5	Pengadaan Bibit/Tanaman untuk pemulihan lahan jenis Fast Growing (Tanaman yang cepat tumbuh(tanaman buah-buahan, tumbuhan Sengon, pinus, eucalyptus, Acasia crassicaarpa, pulai, Alaban, sungkai, ketapang, lamtoro, trembesi, kaliandra)	Kembang Janggut, Kota Bangun, Kota Bangun Darat, Muara Badak, Muara Jawa, Muara Kaman Muara Muntai, Samboja, Sanga-sanga, Sebulu, Tabang, Tenggarong, Tenggarong Sebrang	32	-	12	19	1	-
6	Pengadaan Kendaraan Alat Angkut Sampah (Dump Truck)	Anggana, Kembang Janggut, Kenohan, Kota Bangun, Kota Bangun Darat, Loa Janan, Loa Kulu, Marang Kayu, Muara Badak, Muara Jawa, Muara Kaman, Samboja Barat, Sanga-sanga, Sebulu, Tenggarong	37	-	8	14	15	-
7	Pengadaan Kendaraan Alat Angkut Sampah (Pick Up),	Kota Bangun, Kota Bangun Darat, Loa Kulu, Loa Janan, Marang Kayu, Muara Badak, Muara Kaman, Muara Muntai, Muara Wis, Sebulu, Tabang, Tenggarong, Tenggarong Sebrang	33	-	5	17	11	-
8	Pengadaan Madu Kelulut (Kelenceng)	Kota Bangun, Marang Kayu, Tenggarong, Tenggarong Sebrang	11	-	11			-
9	Pengadaan Mesin Paving Block Sampah	Loa Kulu, Marang Kayu, Muara Jawa, Muara Kaman, Muara Muntai, Samboja, Tenggarong	12	-	7	4	1	-





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Daftar Kegiatan Lintas Perangkat Daerah dan Lintas Wilayah
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Volume	Alasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pengadaan Pohon Ulin Desa Kota Bangun III	Desa Kota Bangun III, Kab. Kutai Kartanegara	400 Batang Pohon	Program Prioritas Kukar Peduli Lingkungan
2.	Pengadaan Bibit Durian Kelompok Tani Maju Sejahtera	Kel. Muara Jawa Ilir Handil 8 RT.016, Kab. Kutai Kartanegara	100 Bibit Tanaman	Program Prioritas Kukar Peduli Lingkungan
3.	Pengadaan Bibit Buah	Desa Bukit Raya, Kec. Tenggarong Seberang, Kab. Kutai Kartanegara	100 Bibit Buah	Program Prioritas Kukar Peduli Lingkungan
4.	Pengadaan Tanaman Jenis Buah dan Planter Bag Kelompok PKK RT 002 Desa Bukit Raya	RT 002 Desa Bukit Raya, Kec. Tenggarong Seberang, Kab. Kutai Kartanegara	100 Bibit Buah	Program Prioritas Kukar Peduli Lingkungan
5.	Pengadaan Madu Kelulut KUPS Mutiara Tanjung	Desa Muhuran. Taman KUPS Mutiara Tanjung, Kec. Kota Bangun, Kab. Kutai Kartanegara	40 Log	Program Prioritas Kukar Peduli Lingkungan
6.	Pengadaan Madu Kelulut Kelompok Masyarakat Untung Bersama	Jl. M. Siddiq RT. 017 Dusun Mawar Desa Kota Bangun Ulu, Kec. Kota Bangun, Kab. Kutai Kartanegara	40 Log	Program Prioritas Kukar Peduli Lingkungan
7.	Pengadaan Madu Kelulut	LPM Desa Santan Tengah, Kec. Marangkayu, Kab. Kutai Kartanegara	40 Log	Program Prioritas Kukar Peduli Lingkungan
8.	Pengadaan Madu Kelulut	RT 7 Dusun Wira III, Desa Santan, Kec. Marangkayu, Kab. Kutai Kartanegara	40 Log	Program Prioritas Kukar Peduli Lingkungan



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

9.	Pengadaan TPS3R	Loa Sakoh, Kec. Kembang Janggut, Kab. Kutai Kartanegara	1 Unit	Program Prioritas Kukar Peduli Lingkungan
10.	Pengadaan TPS3R	SDN 017 Kota Bangun, Kec. Kota Bangun, Kab. Kutai Kartanegara	1 Unit	Program Prioritas Kukar Peduli Lingkungan
11.	Pengadaan TPS3R	RT 24 Loa Duri Ilir, Kec. Loa Janan, Kab. Kutai Kartanegara	1 Unit	Program Prioritas Kukar Peduli Lingkungan
12.	Pengadaan TPS3R	Desa Badak Baru, Kec. Muara Badak, Kab. Kutai Kartanegara	1 Unit	Program Prioritas Kukar Peduli Lingkungan
13.	Pengadaan TPS3R	Dusun Telaga Kencana, Desa Manunggal Jaya, Kec. Tenggarong Seberang, Kab. Kutai Kartanegara	1 Unit	Program Prioritas Kukar Peduli Lingkungan
14.	Pengadaan Bibit Buah dan Buah Endemik serta Bibit Pohon Kayu	Desa Kota Bangun II, Kec. Kota Bangun	1872 Bibit	Program Prioritas Kukar Peduli Lingkungan
15.	Pengadaan Bibit Buah dan Buah Endemik serta Bibit Pohon Kayu	Loa Sakoh, Kec. Marangkayu	1878 Bibit	Program Prioritas Kukar Peduli Lingkungan

Demikain Usulan Musrenbang yang akan di akomodir Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara yang merupakan Kegiatan Super Prioritas dan Prioritas melalui Rapat Forum Lintas OPD yang di dilaksanakan tanggal 11 Maret 2025 bersama OPD Dinas Perumahan dan Permukiman serta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di gedung Bappeda.





**BAB III TUJUAN,
SASARAN, PROGRAM
DAN KEGIATAN**

**3.1 Telahaan terhadap
kebijakan Nasional dan
Provinsi**

**3.2 Tujuan dan Sasaran
Rencana Kerja Dinas
Lingkungan Hidup dan
Kehutanan**

BAB III

**TUJUAN DAN SASARAN
PERANGKAT DAERAH**

3.1. Telahaan terhadap Kebijakan Nasional

Di dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi, maka Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan melaksanakan kebijakan daerah yang sinergis dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maupun pusat. Dalam melaksanakan fungsi- fungsi tersebut maka kegiatan yang akan dilakukan diharapkan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan di atasnya, mempunyai rasa keadilan, pemerataan dan diarahkan implementasinya akan dapat berdampak pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara.

Adapun arah pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2020-2024, yaitu :

- Memperkuat ekonomi nasional, investasi dan ekspor, melalui langkah-langkah penataan regulasi dan





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

- Memperkuat ekonomi nasional, investasi dan ekspor, melalui langkah-langkah penataan regulasi dan dukungan iklim usaha, serta penguatan Tata kelola untuk kepastian hukum;
- Pengentasan kemiskinan melalui perhutanan sosial, TORA dan pendampingan usaha pada kelompok masyarakat dan kelompok tani hutan mandiri;
- Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan melalui Rehabilitasi DAS, perlindungan dan pengawasan kawasan hutan, pengendalian pencemaran, pengelolaan dampak, penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta restorasi lahan gambut;
- Pembangunan infrastruktur lingkungan dalam mendukung program prioritas nasional (pengentasan kemiskinan, pengembangan ekowisata);
- Penguatan pendidikan vokasional dan penguatan program yang menyerap tenaga kerja masyarakat dalam jumlah besar.

Tujuan dan peran utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut akan diraih melalui perumusan sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai berikut :

- a. Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat;
- b. Memanfaatkan potensi sumber daya hutan dan lingkungan hidup secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan;
- c. Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan sumber daya alam sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Sejalan dengan hal tersebut pelaksanaan fungsi pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabuapten Kutai Kartanegara diharapkan tidak bertolak belakang dengan Strategi dan arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur.

Adapun strategi dan arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 dapat diuraikan sebagai berikut :

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019 - 2023	
Tujuan : Mewujudkan Ruang Wilayah Provinsi yang mendukung Pertumbuhan Ekonomi Hijau yang Berkeadilan dan Berkelanjutan berbasis Agroindustri dan Energi Ramah Lingkungan	
Arah Kebijakan	Strategi
1. Pengembangan sektor ekonomi produktif migas dan batubara yang bernilai tambah tinggi dan berwawasan lingkungan menjadi sektor unggulan provinsi untuk memacu pertumbuhan ekonomi serta pemanfaatannya bagi segenap masyarakat	a. Perwujudan struktur ruang yang mampu mendukung pengembangan sektor ekonomi produktif migas dan batubara yang bernilai tambah tinggi;
	b. Perwujudan pola ruang yang mampu mendukung pengembangan sektor ekonomi produktif migas dan batubara yang berwawasan lingkungan;
	c. Pengembangan kawasan strategis industri turunan migas dan batubara yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan daya saing dan investasi
	d. Membatasi izin pembukaan kawasan eksplorasi baru dan mengoptimalkan kawasan eksploitasi eksisting
2. Pengembangan sector unggulan untuk mengantisipasi berkurangnya sumber daya migas dan batu bara yang tidak dapat diperbaharui melalui pengembangan sector pertanian, pariwisata dan energi yang dapat diperbaharui, sebagai bagian upaya meningkatkan ketahanan pangan dan energy wilayah dan nasional	a. Perwujudan struktur ruang yang mampu mendorong pertumbuhan sector pertanian untuk lebih berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi wilayah;
	b. Perwujudan pola ruang yang mampumendukung pengembangan komoditas unggulan sector pertanian dan pariwisata, sebagai upaya meningkatkan ketahanan pangan wilayah dan nasional, serta mendukung transformasi ekonomi;
	c. Pengembangan kawasan strategis agroindustri sebagai pusat pertumbuhan baru untuk mendorong pemerataan pertumbuhan antar wilayah; dan
	d. Pengembangan sumber dan teknologi pemanfaatan energy terbarukan sebagai upaya meningkatkan ketahanan energy wilayah dan nasional
3. Perwujudan ruang yang bersinergi dengan pertumbuhan ekonomi hijau	a. Penurunan emisi dan jejak karbon dari sektor-sektor ekonomi produktif dalam perwujudan pemanfaatan ruang;
	b. Penguatan prinsip kerjasama dalam konservasi hutan dan pengelolaan lahan yang berkelanjutan serta kesejahteraan masyarakat yang ada di wilayah kawasan lindung dan wilayah Heart of Borneo (HoB); dan
	c. Penguatan kelembagaan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan dalam implementasi ekonomi hijau
4. Perwujudan pemerataan hasil pembangunan dan pelayanan bagi seluruh masyarakat dengan memberikan kesempatan pada seluruh bagian wilayah untuk berkembang sesuai potensi	a. Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana wilayah sebagai penunjang kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat
	b. Pemerataan pengembangan wilayah melalui keseimbangan pembangunan dan keterkaitan kawasan permukiman perdesaan dan permukiman perkotaan sebagai penunjang kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
	c. Pengembangan kawasan-kawasan strategis sebagai penunjang kegiatan ekonomi dan social budaya masyarakat; dan
	d. Pengembangan keterkaitan pusat kegiatan di kawasan perbatasan antar negara untuk mencegah kebocoran ekonomi dan menjaga kedaulatan NKRI
5. Perwujudan pembangunan yang berkelanjutan dengan menjaga harmonisasi kegiatan ekonomi, investasi, social dengan mempertimbangkan daya dukung dan kelestarian lingkungan serta menunjang aspek politik, pertahanan dan keamanan	a. Pengendalian pembangunan melalui upaya tindak antisipatif dan kuratif yang konsisten dalam pengelolaan
	b. Peningkatan upaya pemeliharaan dan rehabilitasi kawasan yang telah mengalami degradasi lingkungan dan berpotensi menimbulkan dampak bencana;
	c. Penetapan kawasan lindung dan budidaya berdasarkan karakteristik, kesesuaian dan daya dukung lingkungan yang turut mempertimbangkan produktivitas ekonomi dan kepentingan social budaya; dan
	d. Peningkatan fungsi pertahanan dan keamanan pada pusat kegiatan di wilayah perbatasan negara melalui penetapan zona penyangga yang berfungsi untuk pengamanan kawasan lindung dan pengembangan kawasan budidaya secara efektif.





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan pernyataan untuk mendukung visi dan misi Bupati, yaitu “ Terwujudnya Kutai Kartanegara yang sejahtera dan bahagia. Pada misi ke 5 yaitu : Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan. Adapun tujuan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu :

Tujuan : “Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup”

Berdasarkan tujuan di atas maka disusunlah sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tabel TC.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten
Kutai Kartanegara 2022-2026

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					KONDISI AKHIR
						2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	72,82	73.14	73.47	73.81	74.15	74.51	74.51
2		Meningkatnya upaya pencegahan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup	Penurunan Emisi GRK (CO2 EQ)	CO2EQ	18.212	18.640	19.085	19.531	19.976	20.394	497.371
			Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	57.22	57.32	57.42	57.52	57.62	57.72	52.05
			Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	88.68	88.78	88.89	88.89	89.09	89.19	92,73
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks	70.26	71.38	72.49	73.89	74.88	76.20	75,17





BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

4.1 Program dan kegiatan tahun 2026

4.1 Program dan Kegiatan

Dalam mencapai tujuan dan sasarannya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabuptaen Kutai Kartanegara pada Tahun 2026 akan melaksanakan 12 (Dua belas) program dan 25 (Dua Puluh Lima) Kegiatan dan 87 (Delapan Puluh Empat) sub kegiatan, dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 ini kegiatan dilakukan dalam dua urusan yaitu urusan Lingkungan Hidup dan Urusan Kehutanan. Adapun program dan kegiatan yang dimaksud

Beberapa Usulan Penambahan Sub Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Masih akan Melanjutkan Program Prioritas Idaman yang Di Amanah kan pada 4 (Empat) Program, yaitu Program Pengelolaan Sampah Kegiatan Pengelolaan Sampah DAN Program Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) dengan nama PROGRAM KUKAR PERDULI LINGKUNGAN dan PROGRAM DUNIA USAHA RAMAH LINGKUNGAN, Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Usaha dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Pelaksanaan dan Program Pengendalian Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan nama Program DESA RAMAH LINGKUNGAN dan PROGRAM DUNIA USAHA RAMAH LINGKUNGAN.





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Disesuaikan dengan Permendagri 90 dan lampiran 050. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026 pelaksanaan kegiatan tersebar di 20 Kecamatan dan 46 kelurahan . keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun rencana program kegiatan, lokasi, pagu anggaran kebutuhan dan sumber pendanaan sebagaimana berikut





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Program Penunjang Program Dedikasi Kukar Idaman Tahun 2026

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Dana	Program Dedikasi
				Tahun 2026	Target 2026	
1	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi	20 Kegiatan	80.000.000,00	Desa Ramah Lingkungan
			Pelaksanaan Rehabilitasi	5 Ha	604.146.000,00	
2	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	1 Dokumen	100.000.000,00	Dunia Usaha Ramah Lingkungan
3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	120 Badan Usaha	350.000.000,00	Dunia Usaha Ramah Lingkungan
4	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	110 Desa/Kelurahan Penghargaan	1.000.000.000,00	Desa Ramah Lingkungan
5	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	4+A10:A16	Penyusunan Kebijakan dan Strategi DaerahmPengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	9 Dokumen	2.300.000.000,00	Kukar Perduli Lingkungan
			Pengurangan sampah melalui pendauran	21 Unit	85.080.000.000	
			Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana	1.252 Unit	41.245.750.000	
			Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	5 Kelompok	2.615.000.000,00	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan	10 Dokumen	7.750.000.000,00	
			Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	23 Dokumen	325.000.000,00	
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	11.411 Unit	147.579.710.587,83	





A, Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Adapun Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2026 Program, secara besar telah sesuai dengan rancangan awal RKPD , akan tetapi dari segi pagu indikatif tidak sesuai dan mengalami pengurangan pagu secara signifikan yaitu Analisis Kebutuhan Anggaran pada rancangan renja Sebesar Rp. 346.372.234.783,-RPKD Pagu Anggaran menjadi Rp 214.593.710.838,- mengalami penurunan sebesar Rp. 131.778.523.945,- atau 21,45% , adalah Program Pengelolaan Sampah yang juga pengampu Program Prioritas Kukar Idaman dengan Program Kukar Peduli Lingkungan, akan tetapi untuk Program Kegiatan dan Sub Kegiatan yang lain juga mengalami pengurangan dan penambahan yang tidak signifikan.

Beberapa Sub Kegiatan juga mengalami penambahan baik di bidang Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, serta Urusan Kehutanan bidang Tata lingkungan, semua sub kegiatan tersebut telah disesuaikan dengan Permendagri 90 dan lampiran 050, pelaksanaan kegiatan tersebar di 20 Kecamatan dan 46 kelurahan. Ke Keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Adapun Kegiatan Bidang Sekretariat baik di bidang Program dan di Umum Tatalaksana dan Kepegawaian, mengalami peningkatan pagu dan penambahan Sub Kegiatan Baru yaitu mandatory pada tahun 2025, untuk Mengoptimalkan kegiatan- kegiatan tersebut bertujuan untuk menambah Output pekerjaan berkaitan dengan upaya perbaikan dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih maksimal dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota.

Terhadap hasil Rancangan awal Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdapat beberapa evaluasi yang kemudian dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja 2025 antara lain :

a. Uraian garis besar rekapitulasi program dan kegiatan Penambahan Sub Kegiatan Baru

Pada Rencana Kerja (Renja) 2025, Terdapat beberapa sub kegiatan baru yang sebelumnya pada Rancangan Awal belum dianggarkan antara lain :

- a. ***Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah***
Pagu Rp. 50.000.000,00 sub Kegiatan mandatory langsung dari OPD bappeda;
- b. ***Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah***, Pagu Rp. 100.000.000,00 sub Kegiatan mandatory langsung dari OPD bappeda
- c. ***Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang urusan yang diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*** Pagu Rp. 50.000.000,00 sub Kegiatan mandatory langsung dari OPD bappeda;
- d. ***Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD***, Pagu Rp. 50.000.000,00 sub Kegiatan mandatory langsung dari OPD bappeda;





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

- e. *Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*, Pagu Rp. 25.000.000,00 sub Kegiatan mandatory langsung dari OPD bappeda;
- f. *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*, Pagu Rp. 50.000.000,00 sub Kegiatan mandatory langsung dari OPD bappeda;
- g. *Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*, Pagu Rp. 25.000.000,00 sub Kegiatan mandatory langsung dari OPD bappeda;
- h. *Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD*, Pagu Rp. 50.000.000,00 sub Kegiatan mandatory langsung dari OPD bappeda;
- i. *Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD*, Pagu Rp. 10.000.000,00 sub Kegiatan mandatory langsung dari OPD bappeda;
- j. *Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah*, Pagu Rp. 10.000.000,00 sub Kegiatan mandatory langsung dari OPD bappeda;
- k. *Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah*, Pagu Rp. 10.000.000,00 sub Kegiatan mandatory langsung dari OPD bappeda;
- l. *Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi*, Pemutakhiran yang sebelum nya sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi, pagu Rp. 50.000.000,00 ;
- m. *Pelaksanaan Rehabilitasi* Pemutakhiran yang sebelum nya sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi, pagu Rp. 604.146.000,00; (Termasuk Anggaran Aspirasi Masyarakat)
- n. *Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi*, pemutakhiran dari sub Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi, pagu Rp. 75.000.000,00;
- o. *Pelaksanaan Restorasi* , pemutakhiran dari sub Koordinasi, Sinkronisasi dan





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Pelaksanaan Restorasi, pagu Rp. 445.465.000,00; (Termasuk Anggaran Aspirasi Masyarakat)

- p. Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati*, akan di laksanakan kembali di tahun 2025 dengan pagu Rp. 250.000.000,00 dengan tujuan akan menyusun Dokumen Rencana Pengelolaan Kehati menjelaskan tentang pengelolaan Kehati di kabupaten Kukar dan dokumen ini sebagai tindak lanjut dokumen Profil kehati di tahun 2020;
- q. Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup*, dengan pagu Rp. 30.000.000,00, Tambahan/pembentukan PPLH dalam rangka meningkatkan kinerja pengawasan, Sesuai Kepmendagri 900.1.15.5- 1317 Tahun 2023;
- r. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota*, pagu Rp. 180.000.000,00;
- s. Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota*, pagu Rp. 50.000.000,00; melanjutkan dari tahun sebelumnya
- t. Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota*, pagu Rp 150.000.000,-
- u. Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah*, pagu Rp. 30.400.000.000,-
- v. Pengelolaan Jenis Tumbuhan dan Satwa beserta Habitatnya d Tahura Kabupaten/Kota*, Pagu 250.000.000,00; Sub kegiatan Pemutakhiran dengan tujuan akan agar dapat mengitung Indeks Kehati di Kabupaten Kutai Kartanegara;





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

- w. *Perencanaan Pengelolaan TAHURA, Pagu 250.000.000,00, Setelah dilakukan penetapan dan penataan batas luar Tahura pada tahun 2024 maka akan dilakukan penyusunan peta blok tahura yang membagi tahura menjadi beberapa blok pengelolaan dan pembuatan peta penataan wilayah kerja pengelolaan tahura.*
- x. *Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota , Pagu Rp. 1.500.000.000,-*

Penyusunan Dokumen pengelolaan tahura baik jangka panjang dan jangka pendek akan memberikan arahan dan kebijakan dalam pengelolaan tahura untuk jangka waktu tertentu sehingga pengelolaan tahura dapat tercapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.





BAB V PENUTUP

5.1. Catatan Penting

Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 merupakan Dokumen perencanaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memuat tentang program dan kegiatan selama periode 1 (satu) tahun dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Kutai Kartanegara. Penyusunan Renja dilakukan dengan pendekatan partisipatif, *Top-Down* dan *Bottom-Up*. Sehingga dilakukan penyesuaian antara tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, partisipasi masyarakat dan pokok-pokok pikiran Dewan .

Proses penyusunan rencana kerja ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi dari semua komponen di masyarakat dan di Internal Dinas Lingkungann Hidup dan Kehutanan yang selanjutnya dikoordinasikan dan dikomunikasikan dengan seluruh personel di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang kompeten, sehingga hasilnya diharapkan lebih optimal.

5.2. Kaidah-kaidah pelaksanaan

Pada tahun 2026, pelaksanaan kegiatan diutamakan dalam mendukung Indikator Kinerja Utama sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara. Yaitu indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan tutupan lahan. Selain itu pemenuhan target Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang melekat pada masing-masing program.





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara ini disusun untuk dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sehingga lebih efektif dan efisien dalam mencapai sasaran. Terhadap program dan kegiatan yang sudah menjadi prioritas agar betul-betul dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan senantiasa berprinsip pada asas efisiensi, efektifitas serta akuntabilitas dan juga tetap berpedoman pada perencanaan yang sudah disusun dengan terget sasaran yang sudah ditetapkan.

Tenggarong, 15 Agustus 2025

